

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Dwiyanto, 2005, "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*", Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Bayu Suryaningrat, 1980, "*Desa Dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintah*", Metro Pos, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2007, "*Metode Penelitian Hukum*", Rieneka Cipta, Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2011, "*Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Erlangga, Jakarta
- Hendra Mondong, 2010, "*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*", UNSRAT, Manado
- Rahardjo Adisasmata, 2006, "*Membangun Desa Partisipatif*", Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rianingsih Djohani, 2008, "*Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*", Studio Driya Media-OC FPPM, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, "*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sedarmayanti, 2009, "*Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*", PT.Refika aditama, Bandung
- Soegarda poerbabawaja, 2001, "*Partisipasi Masyarakat*", Depdiknas, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2012, "*Sosiologi suatu pengantar*", Raja Grafindo Persada  
Jakarta

Taliziduhu Ndraha, 1984, "*Dimensi-dimensi pemerintah desa*", Bina aksara,  
Jakarta

Yayuk Yuliati, 2003, "*Sosiologi Pedesaan*", Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta

Widjaja, 2008, "*Otonomi desa*", Rajawali Pers, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Larela Pustaka  
Utama, Jakarta

#### **Jurnal**

Harry Cristian, 2015, "*Study Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan  
Desa (Rkpdes) " tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa  
Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*", E-Jurnal Pemerintahan Integratif,  
Universitas Mulawarman

Ierma Sunarty Purba, 2015, "*partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good  
Governance di Tingkat Desa*", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial  
Poitik, Universitas Negeri Medan

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi  
dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014  
tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan  
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

